

REFERENCES

- Ambarawati et al., 2016, *Analisis Perubahan Zona Nilai Tanah Berdasarkan Harga Pasar Untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD)*, Jurnal Geodesi UNDIP Volume 5, Number 2, 2016, Semarang
- Appraisal Institute (US). 2001. *The Appraisal of Real Estate*. Twelfth Edition. Chicago: Appraisal Institute.
- Bird, Richard M. and Slack, Enid (2002) *Land and Property Taxation Around the World: A Review*, the University of Toronto
- Cresswell, John Well. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*. Third Edition. Thousand Oaks. California.
- Cresswell, John Well. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*. Fourth Edition. Thousand Oaks. California.
- De Cesare, Claudia M (1997) *An empirical Analysis of a Property Tax system: a Case Study from Brazil*, University of Salford, UK; Porto Alegre City Council, Brazil
- Dillard, J.F., Rigsby, J.T. and Goodman, C. (2004), "*The making and remaking of organization context: duality and the institutionalization process*", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 17 No. 4, pp. 506-42.
- DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review* 48:147-160.
- Frumkin, Peter and Galaskiewicz, Joseph, 2004, *Institutional Isomorphism and Public sector Organizations*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 14 no. 3
- Halim, Abdul; Rangga Bawono, Icuk, and Dara, Amin (2014), *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus, Salemba Empat, Jakarta*
- Hennink, Monique, Inge Hutter, Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications
- Kabupaten Bantul. 2011. *Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah*. Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2011. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bantul

- Kabupaten Bantul. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bantul
- Kabupaten Bantul. 2020. Keputusan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Bantul Tahun Pajak 2020. Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bantul
- Kementerian Keuangan. 1998. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 115/PJ./2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/Pj/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Kota Yogyakarta. 2014. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 92. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta
- Kota Yogyakarta. 2019. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 512 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta Tahun 2020. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta

- Kota Yogyakarta. 2019. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta
- Kota Yogyakarta. 2019. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta
- Kota Yogyakarta. 2019. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta
- Rankin et al. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Australia, Queensland : John Wiley & Sons Australia Ltd.
- Richard M. Bird, 2006. "Taxing Land and Property in Emerging Economies: Raising Revenue...and More?," *International Tax Program Papers 0605*, International Tax Program, Institute for International Business, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.
- Republik Indonesia. 1994. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta

- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 304. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta
- R. O.H. Monding., R.J. Pusung, 2016, *Level Analysis of Accuracy of the Land and Building Of the Tax Object Selling Value (TOSV) Determination at Paal Dua Sub-District Manado City*, Jurnal EMBA Vol.4 No.4 December 2016, Page. 993 - 1000
- Scott, W. Richard, 1987. "The Adolescence of Institutional Theory." *Administrative Science Quarterly* 32:493-511.
- Scott, W. Richard (1995/2001/2008/2013). *Institutions and Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Siahaan, E. et al. , 2018, *Optimization Of Updating Land and Building Local Own – Source Revenue For Medan Development*. *Abdimas Talenta* 3 (2) 2018: 141-147, LPPM Universitas Sumatera Utara
- Yin, Robert K, 2014. *Case Study Research: Design and Methods*, Fifth Edition. Thousand Oaks, SAGE Publication.
- Yunarti D. et al., 2016, *Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kabupaten Malang Ditinjau dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi yang Berlaku)*, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016, perpajakan.studentjournal.ub.ac.id